



Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam

Vol 2 No 2 Tahun 2023

ISSN: 2808-2362

<https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai>

**PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI
INDONESIA
(Telaah Kurikulum PAI Pra Kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka)**

Zulkifli, Muhammad

UIN Mataram

Email: zul.faqih@gmail.com, muhammad@uinmataram.ac.id

Abstract

This study aims to describe the development of the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in Indonesia, with a focus on the development of the Pre-Independence, Old Order, New Order, and Reform Era to the Independent Curriculums. This research uses the library research method. Data collection was carried out using documentation study techniques. The results of this study indicate that Islamic Religious Education (PAI) is experiencing dynamics of development in line with the government's political attitude towards Muslims. Entering the end of the New Order era to the current reform era, Islamic religious education is experiencing positive developments, it's just that the curriculum still has to be designed to be compatible with the dynamics of the times.

Keywords: Curriculum Development, Islamic Religious Education in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan kurikulum PAI Pra Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi hingga Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) mengalami dinamika perkembangan sejalan dengan sikap politik pemerintah terhadap umat Islam. Memasuki era akhir orde baru hingga era reformasi sekarang ini pendidikan agama Islam mengalami perkembangan positif, hanya saja kurikulumnya masih tetap harus didesain agar kompatibel dengan dinamika zaman.

Kata Kunci: Perkembangan kurikulum, Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kurikulum menjadi unsur terpenting dari pendidikan. Searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara resmi, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah, artinya kurikulum sudah diterapkan sejak saat penjajahan Belanda.¹ Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan di negara tersebut.²

Kurikulum bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan karena banyak factor yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dari negara dijajah menjadi negara merdeka.³ Perubahan kurikulum adalah bentuk sebagai pengaruh dari perubahan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, misalnya seperti Rencana Pelajaran 1952 merupakan konsekuensi lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1950 dan kurikulum 1994 merupakan konsekuensi dari lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989.⁴

Kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perjalanannya telah melakukan berbagai perkembangan mulai dari sentralisasi, desentralisasi serta otonomi terhadap pendidikan dan selalu mengalami inovasi setiap tahunnya.⁵ Perkembangan kurikulum di Indonesia tidak terlepas dari usaha pemerintah, pelaksana pendidikan dan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya kualitas proses dan rata-rata kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam konteks persaingan regional dan global.

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani dari kata *curir* yang berarti pelari, dan *curere* yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena

¹ Fitri Wahyuni, *Kurikulum dari Masa Ke Masa, Jurnal, Al-Adabiya*, Vol. 10 No. 2, Juli – Desember 2015.

² Lismina, *Pengembnagan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Ponorogo : TimUwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 1.

³ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 251.

⁴ Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum & Materi Pembelajaran*, (Jakarta :Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 92.

⁵ Asfiati, *Pendekatan Humanis dalam Pengembangan Kurikulum* (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 24.

perlombaan.⁶ Berbeda dari pengertian di atas, S. Nasution berpendapat bahwa kata kurikulum berasal dari bahasa latin *curriculum* yang berarti bahan pengajaran.⁷ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer kata kurikulum diterjemahkan sebagai perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan, atau perangkat mata kuliah bidang khusus.⁸ Oemar Hamalik menyatakan bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa.⁹

Kurikulum dalam bahasa Arab diartikan dengan *manhaj*,¹⁰ yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap serta nilai-nilai.¹¹ Muhaimin menjelaskan (dikutip dari pernyataan Al-Khauly) bahwa *al-Manhaj* sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.¹²

Dalam dunia pendidikan kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Secara lebih luas kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu, kurikulum diartikan sebagai aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran.

⁶ Fitri Wahyuni, *Kurikulum dari Masa ke Masa; Telaah atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia*, (Jurnal Al-Adabiya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2015), h. 232.

⁷ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, cet. Ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 1.

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 802.

⁹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 65.

¹⁰ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 1567, menerjemahkan kata *manhaj* dengan rencana pengajaran. Mengutip terjemahan dari Al-Munawwir, Syaifuddin Sabda dalam bukunya memunculkan istilah *Minhaj al ta'lim* yang berarti rencana pengajaran atau kurikulum pembelajaran. Dalam bentuk lain dikenal pula istilah *Minhaj al-dirasi* atau kurikulum mata pelajaran atau *Minhaj al Madrasah* (Kurikulum Sekolah/Madrasah). Lihat Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum...*, h. 23.

¹¹ Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 478.

¹² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), h. 1.

Ahmad Tafsir juga menjelaskan makna kurikulum secara luas tidak hanya sekedar berisi rencana pelajaran atau bidang studi, melainkan semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah.¹³ Sedangkan Hasan Langgulung mendefinisikan Kurikulum secara terminologis modern sebagai sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian, baik yang berada di dalam maupun luar kelas yang dikelola oleh sekolah.¹⁴

Menurut Syaifuddin Sabda berpendapat bahwa pergeseran dan perluasan makna kurikulum sejalan dengan perkembangan filosofis, teori dan konsep pendidikan dan kurikulum yang terus mengalami perkembangan dan pergeseran makna dari hanya sebagai isi (konten) pendidikan atau pembelajaran ke pengertian sebagai sebuah proses, dan pergeseran dari pengertian sempit ke konsep kurikulum dalam makna yang luas.¹⁵

Dari berbagai makna kata kurikulum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa ahli yang menekankan kata kurikulum kepada isi pembelajaran atau mata pelajaran, dan di lain pihak lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar.

Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam proses perkembangan kurikulumnya. M. Asri (2017) menulis tentang “Dinamika Kurikulum di Indonesia” yang memaparkan secara ilmiah tentang dinamika sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia sendiri sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, yang mana dilakukan oleh Lembaga pendidikan pesantren. Kemudian setelah bangsa ini merdeka barulah Indonesia memiliki sekolah yang dikelola sendiri karena sebelum kemerdekaan sistem persekolahan dikuasai oleh para penjajah. Sebelum masuk pada pembahasan kurikulum, mari menilik sejarah pendidikan di Indonesia yang diawali dengan munculnya Pesantren, sekolah dan madrasah”.¹⁶

Pesantren atau pusat pendidikan islam kuat diduga berkaitan dengan kedatangan para musafir dan pedagang muslim yang masuk lewat jalur perdagangan

¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 53.

¹⁴ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), 483-484.

¹⁵ Husin, *Perkembangan dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia; Tinjauan Historis, Sosiologis, Politis, Ekonomi, dan Manajemen Negara*, (ADDIBA Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 2, 2018), h. 74.

¹⁶ Raharjo, *Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn; Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020*, (Jurnal PKN Progresif, Vol. 15 No. 1 Tahun 2020), h. 66.

pada abad 7 M dan 8 M. Kemudian sejak abad 11 M Islam sudah masuk ke pulau-pulau di nusantara dan mulai Intensif menyebar pada abad ke 13 sampai akhir abad 17 dan pada masa itu mulai berdiri pusat-pusat kekuasaan Islam seperti di Aceh, Demak, Giri, Ternate dan Goa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesantren telah mulai dikenal di Indonesia.¹⁷

Pada mulanya, “kurikulum pesantren dilandaskan pada tingkat kemudahan dan kompleksitas kitab-kitab yang dipelajari, mulai dari tingkat awal, menengah dan lanjut. Kemudian dalam perkembangannya pesantren telah melakukan perubahan kurikulum dengan memasukkan pendidikan umum dalam kurikulum pesantren. Sekolah yang pertama didirikan di Jakarta pada tahun 1617 pada masa VOC yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten pada VOC” (Daulay, 2001: 35) Sistem pendidikan sekolah ini dikuasai oleh penjajah, dan baru setelah merdeka barulah Indonesia dapat mengelola sekolah sendiri. Sedangkan madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya (mulai 1919), ada madrasah yang mengaprosiasi sistem pendidikan belanda plus, seperti muhammadiyah (1912) yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah. Ada juga model AL-Irsyad (1913) yang mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassus, atau model Madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian, itulah secara singkat tentang sejarah madrasah di Indonesia.¹⁸

Adapun sejarah pendidikan Indonesia mencatat, “pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian terbilang relatif cepat”, jika dalam pandangan khalayak awam bahwa kesan dari proses perguliran kurikulum di Indonesia adalah ‘ganti Menteri pendidikan maka ganti kurikulum’. Padahal pergantian kurikulum merupakan hal biasa-biasa saja bagi negara yang mempunyai pendidikan yang maju di dunia. Hal itu dilakukan untuk “menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan zaman yang kian maju, sehingga kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia tidak mungkin stagnan. Pengembangan kurikulum juga didasarkan pada hasil analisis, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang

¹⁷ Amirudin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 23.

¹⁸ M. Asri, *Dinamika Kurikulum di Indonesia*, (MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 4 No. 2, 2017), h. 6-7.

terus berubah”.¹⁹ Dengan demikian secara normatif maupun substantif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sejarah perkembangan kurikulum yang sangat dinamis dan cepat, bahkan dalam dinamikanya, pada saat kurikulum sedang diimplementasikan dan belum maksimal, sudah diperbarui lagi atau diganti dengan kebijakan kurikulum yang baru. Adapun Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah sering mengalami perubahan diantaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013.²⁰ Bahkan sekarang muncul kurikulum baru yang dikenal dengan istilah kurikulum merdeka (2020-sekarang).

Adapun kurikulum Pendidikan agama islam merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan Pendidikan agama islam yang sekaligus juga arah Pendidikan agama dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dalam konsep islam menuju Insan Kamil sebagai *'Abdullah* dan sekaligus *Khalifatullah fil ardhi*. Pendidikan agama islam akan membawa dan menghantarkan serta membina anak didik menjadi warga negara yang baik sekaligus umat yang taat beragama.

Tujuan Pendidikan agama islam (PAI) ditekankan pada terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu ditetapkan kompetensi atau kemampuan dasar yang perlu dicapai oleh setiap peserta didik pada setiap jenjang Pendidikan. Kurikulum PAI dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kurikulum di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan kurikulum PAI yang pada masa pra kemerdekaan sangat tidak diperhatikan. Kemudian pasca kemerdekaan khususnya pada masa orde lama sudah mulai muncul kurikulum PAI meskipun masih dipandang sebelah mata. Pada masa orde baru kurikulum PAI mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dan terakhir pada masa reformasi hingga saat ini kurikulum PAI tidak lagi dipandang sebelah mata dan tidak lagi dianak tirikan, bahkan sudah dianggap sebagai anak kandung dalam system Pendidikan nasional di Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah ini yang akan diberi judul **“Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Telaah Kurikulum Pra Kemerdekaan hingga Kurikulum**

¹⁹ Imam Machali & Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 421.

²⁰ Farah Dina Insani, *Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan hingga Saat Ini*, (Jurnal As-Salam, Vol. VIII No. 1, Tahun 2019), h. 46-47.

Merdeka)”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang menggunakan semua literatur dalam mengolah dan menganalisis data baik dari buku, jurnal, ataupun sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN KURIKULUM PAI DARI PRA KEMERDEKAAN HINGGA KURIKULUM MERDEKA

1. Kurikulum PAI Masa Pra Kemerdekaan

Pada dasarnya pendidikan agama Islam sangat tidak diperhatikan pada masa ini. Pendidikan pada pra kemerdekaan ini dipengaruhi oleh kolonialisme. Hasilnya bangsa ini dididik untuk mengabdikan kepada penjajah. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah.²¹ Pada mulanya, mereka tidak pernah terpikirkan untuk memperhatikan pendidikan namun murni hanya mencari rempah-rempah. Meski demikian, bangsa Eropa ini juga memiliki misi penyebaran agama. Karena itu pada abad ke-16 dan 17, mereka mendirikan lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Nusantara. Pendidikan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka tapi juga penduduk pribumi yang beragama Kristen.²²

Selanjutnya, pihak penjajah yang merasakan perlu adanya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis guna membantu pengembangan usaha, khususnya tanam paksa, maka dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan. Namun kelas ini masih hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas, yaitu anak-anak priyai. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma

²¹ M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), h. 47.

²² Ahmad Dhaifi, *Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia* (Jurnal Edureligia, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017), h. 77.

masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial.²³

2. Kurikulum PAI Masa Orde Lama (1945 – 1965)

Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum, yaitu: Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, dan kurikulum 1964. Kurikulum 1947 dikenal dengan Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947. Namun karena beberapa sebab, kurikulum ini dalam prakteknya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Oleh sebab itu, banyak kalangan menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai tahun 1950. Adapun keberadaan pendidikan agama Islam telah diatur pelaksanaannya dalam SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri Agama) tahun 1946.

Kurikulum 1947 ini masih kental dengan corak system pendidikan Jepang ataupun Belanda (Sutrisno, 2012:63-64). Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena Negara ini baru merdeka. Sehingga, proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta Negara, sehingga menjadi berdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya kurikulum 1952 atau disebut dengan Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa, dalam bentuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, dan sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini sebagaimana diatur dalam UUPPP (Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Selanjutnya, muncul SKB dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah, minimal 2 jam perminggu.

Selain itu, DEPAG juga telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun pesantren, akhirnya dibentuklah tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu.

Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan

²³ Amirah Mawardi, *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Jurnal Tarbawi, Vol. 1 No. 1,), h. 31

pada Rentjana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap berbagai masalah yang ada. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, hari Krida ditetapkan pada hari sabtu oleh pemerintah. Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1964 direncana agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia Pancasila yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam Tap MPRS No. II Tahun 1960.²⁴

3. Kurikulum PAI Masa Orde Baru (1966 – 1998)

Peralihan dari era orde lama ke era orde baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Berikut ini adalah model kurikulum yang berlangsung selama era orde baru²⁵, antara lain: Kurikulum 1968, boleh dibilang, kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Focus kurikulum ini tidak lagi pancawardhana sebagaimana kurikulum 1964. Hanya saja, pelaksanaan pendidikan agama kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.

Berikutnya Kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Di era inilah dikenal istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana pengajaran pada setiap bahasan. Pendidikan agama islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup signifikan. Adanya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri P&K) serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama mendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umumpun diakui/diperbolehkan. Kondisi demikian berbeda dengan masa-masa sebelum kurikulum 1975 ini diterapkan.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul Kurikulum 1984 atau Kurikulum 1975 yang Disempurnakan. Kurikulum 1984 ini adalah menyempurnakan kurikulum

²⁴ Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi 1947-2013*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 49-50.

²⁵ Ayu Ratih Rizki Pradika, *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 07 No. 01 Tahun 2020), h. 13.

1975. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pendidikan agama dikuatkan melalui SKB 2 Menteri (Menteri P&K dan Menteri dalam Negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum (Muhyidin, 2012:67).

Selanjutnya Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang patut dicatat dalam periode ini adalah, terbitnya UU SISDIKNAS No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam, artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai islam. Lebih jauh, dengan UU SISDIKNAS ini, pendidikan agama Islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan nasional.

4. Kurikulum PAI Era Reformasi (1999 – Sekarang)

Era reformasi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, nyatanya telah pula berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Era ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI.²⁶

Kurikulum di era reformasi juga telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya: Kurikulum 2004, atau lebih dikenal dengan istilah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)”. Kurikulum Berbasis Kompetensi muncul sebagai salah satu dampak dari laju reformasi yang terjadi saat itu.

Menguatkan hal di atas, pemerintah kemudian menetapkan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

²⁶ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 3.

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Diantara karakteristik utama KBK, yaitu: Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi; Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi); Berpusat pada siswa; Orientasi pada proses dan hasil; Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual; Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan; Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar; Belajar sepanjang hayat; Belajar mengetahui (*learning how to know*); Belajar melakukan (*learning how to do*); Belajar menjadi diri sendiri (*learning how to be*); Belajar hidup dalam keberagaman (*learning how to live together*).

Dalam kurikulum KBM, pendekatan belajar mengajar lebih pada jenis pendekatan CTL (*Contekstual Teaching and Learning*), menyangkut konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian otentik. Dengan ditetapkannya kurikulum 2004 ini, maka berimplikasi langsung dengan pelaksanaan pendidikan agama islam, akhirnya madrasahpun menjadikan kompetensi sebagai basisnya.

Namun baru berjalan dua tahun KBK sudah diganti dengan Kurikulum 2006 atau lebih akrab disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan.

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri Agama menandatangani PERMENAG no 02 tahun 2008, menyangkut standard kompetensi lulusan dan standard isi PAI (Sutrisno, 2012:73).

Pada perkembangan selanjutnya, lahirlah Kurikulum 2013 (K-13). Berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat dalam K-13 (Kurikulum 2013), yaitu: *Pertama*, Mewujudkan Pendidikan Berkarakter. *Kedua*, Menciptakan Pendidikan Berwawasan Lokal. *Ketiga*, Menciptakan Pendidikan yang Ceria dan Bersahabat.

5. PAI pada Kurikulum Merdeka

Pada perkembangan selanjutnya, muncul lagi kurikulum baru yang sampai saat ini belum diterapkan secara menyeluruh baik di sekolah maupun di madrasah. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim resmi meluncurkan nama baru dari kurikulum prototipe yang diberi nama kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih luwes serta berpusat pada materi mendasar serta mengembangkan keunikan dan kemampuan siswa.²⁷

Pada prinsipnya, terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini, didasari oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti. Mendikbud di Era ini (Nadiem Makarim) menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana merdeka belajar, utamanya di Perguruan Tinggi. Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu tekonologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila. Tentu saja, poin pertama terkait dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai esensi, berupa keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler.

Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila, Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun enam profil tersebut adalah *pertama*, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. *Kedua*, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. *Ketiga*, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. *Keempat*, gotong-royong, di mana siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang merupakan

²⁷ Restu Rahayu dkk, *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak*, (Jurnal Basicedu, Vol. 6 No. 4 Tahun 2022), h. 6315.

softskill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim. *Kelima*, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. *Keenam*, berakhlak mulia. Di sinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada.

Adapun Implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di sekolah menengah sudah berjalan efektif dan efisien. Kesuksesan hal tersebut karena pemetaan dan pengidentifikasian yang dilakukan guru terhadap siswa berjalan optimal. Dari data pemetaan tersebut seorang guru dapat membuat tujuan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kemampuan dan kebermanfaatan bagi siswa.

Penerapan kurikulum merdeka dengan baik pada mata pelajaran PAI akan memudahkan guru untuk mengajarkan materi-materi yang pokok dan penting kepada siswa tanpa harus terbebani dengan materi-materi lain yang kurang esensial. Materi pelajaran PAI yang sangat luas akan dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang harus disampaikan kepada siswa dengan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan serta mendalam dan tepat sasaran.

Pendidikan Agama Islam itu memiliki cakupan materi yang sangat luas oleh karena itu harus dirumuskan materi-materi penting yang menjadi kewajiban beragama bagi setiap siswa yaitu materi Iman, Islam dan Ihsan. Adapun urutan materi ajar yang paling esensial untuk diajarkan kepada siswa adalah akidah, Al Qur'an dan Hadits, Fikih, Akhlak dan Tarikh, itupun dipilih yang hukumnya fardhu 'ain dan memiliki kebermanfaatan di masyarakat secara luas.²⁸

Sedangkan Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah diterapkan secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, madrasah dapat memilih dua opsi atau pilihan yaitu; *Pertama*, madrasah masih menggunakan kurikulum 2013, dengan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka. Dimana madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasah sesuai visi, misi, tujuan dan target madrasah. Madrasah memiliki fleksibilitas dalam mengelola pembelajaran dan asesmen/penilaian sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Madrasah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberi layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam bakat, minat dan kemampuannya.

²⁸ Ahmad Rifa'i dkk, *Penerapan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI di Sekolah*, (Jurnal Syntax Admiration, Vol. 3 No. 8, Agustus 2022), h. 1010-1011.

Madrasah melaksanakan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, terutama dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin.

Kedua, madrasah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara penuh, artinya menerapkan standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), capaian pembelajaran (CP) sesuai Kurikulum Merdeka. Madrasah melaksanakan spirit kurikulum merdeka dengan melakukan kreasi dan inovasi dalam pengembangan kurikulum operasional madrasah, pembelajaran dan asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya.²⁹

ANALISIS KURIKULUM PAI PRA KEMERDEKAAN HINGGA KURIKULUM MERDEKA

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di Indonesia mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang.³⁰

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Adapun pendidikan agama Islam pada masa Pra Kemerdekaan sangat tidak diperhatikan, pendidikan pada Pra Kemerdekaan ini dipengaruhi oleh kolonialisme yang berpusat pada agama mereka (penjajah), selain itu dari segi kelas hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas, yaitu anak-anak priyai.

Selanjutnya Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada era orde lama, orde baru, era reformasi hingga munculnya kebijakan kurikulum terbaru yakni kurikulum merdeka belajar. Kebijakan kurikulum pada era orde lama dimulai dengan munculnya Kurikulum 1947. Dimana kurikulum ini masih kental dengan corak system pendidikan Jepang ataupun Belanda. Pada perkembangan selanjutnya di era orde lama ini lahirlah Kurikulum tahun 1952-1964 diprakarsai oleh DEPAG dengan membentuk tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama

²⁹ Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2022), h. 4.

³⁰ Muhammad Irsad, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah*, Jurnal Iqra Vol. 2, no. 1 (2016): h. 248.

yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu.

Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rentjana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat.

Kemudian peralihan dari era orde lama ke era orde baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Pada era orde baru sendiri kurikulum telah mengalami beberapa perubahan. Berikut ini adalah model kurikulum yang berlangsung selama era orde baru, antara lain: Kurikulum 1968, boleh dibilang, kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Pelaksanaan pendidikan agama masih kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.

Berikutnya Kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Pendidikan agama islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup signifikan. Adanya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri P&K) serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama mendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umumpun diakui/diperbolehkan. Kondisi demikian berbeda dengan masa-masa sebelum kurikulum 1975 ini diterapkan.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul Kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Pendidikan agama Islam pada kurikulum ini dikuatkan melalui SKB 2 Menteri (Menteri P&K dan Menteri dalam Negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum.

Selanjutnya Kurikulum 1994, yang merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang patut

dicatat dalam periode ini adalah, terbitnya UU SISDIKNAS No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam, artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai islam. Lebih jauh, dengan UU SISDIKNAS ini, pendidikan agama Islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan nasional.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa orde baru ini (Kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, dan kurikulum 1994) pendidikan agama Islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan Nasional.

Kemudian munculnya Era Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013.

Apabila dianalisis secara saksama maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Reformasi dengan ditetapkannya kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), berimplikasi langsung dengan pelaksanaan pendidikan agama islam, akhirnya madrasahpun menjadikan kompetensi, sebagai basisnya.

Adapun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri Agama menandatangani PERMENAG no 02 tahun 2008, menyangkut standard kompetensi lulusan dan standard isi PAI.

Sedangkan kurikulum pada tahun 2013 (K-13) ini berorientasi pada mewujudkan pendidikan berkarakter, menciptakan pendidikan berwawasan local serta menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang

dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, Ilmu pengetahuan dan teknologi.³¹

Adapun kurikulum yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah kurikulum merdeka atau lebih dikenal dengan sebutan IKM. Perlu diketahui bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diberlakukan mulai tahun pelajaran 2022/2023. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.³²

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah pada dasarnya mengikuti kebijakan yang diterapkan di sekolah oleh Kemendikbudristek, namun dalam kondisi tertentu madrasah melakukan adaptasi sesuai kebutuhan pembelajaran pada madrasah dan penguatan pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang menjadi kekhasan madrasah.

Perlu dipahami bahwa Kurikulum Merdeka merupakan salah satu opsi atau pilihan bagi satuan pendidikan untuk digunakan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurun waktu pemulihan pembelajaran dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Selama masa pemulihan pembelajaran, madrasah dapat memilih menggunakan Kurikulum 2013 dan/atau menggunakan Kurikulum Merdeka. Madrasah harus berani melakukan inovasi, kreasi serta terobosan dalam mengelola pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar guru dan peserta didik bergairah dalam pembelajaran. Guru dan peserta didik mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berinovasi agar kualitas pembelajaran semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik secara kuantitas

³¹ Imam Machali, *Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2014*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1111, no. 1 (2014): h. 7-10.

³² Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2022), h. 1.

maupun kualitas. Perkembangan kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia tersebut diklasifikasikan menjadi Lima, yaitu kurikulum pendidikan agama islam pra kemerdekaan, kurikulum pendidikan agama islam masa orde lama, kurikulum pendidikan agama islam masa orde baru, kurikulum pendidikan agama islam masa reformasi, dan kurikulum Pendidikan agama islam pada kurikulum Merdeka (IKM).

Peralihan kekuasaan pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional, buktinya kurikulum yang berlaku juga turut berganti. Pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, untuk memperbaiki kurikulum maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin. (2019). *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi 1947-2013*. Jakarta : Kencana.
- al-Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy. (1979). *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asfiati. (2016). *Pendekatan Humanis dalam Pengembangan Kurikulum*. Medan: Perdana Publishing.
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 4 No. 2
- Dhaifi, Ahmad. (2017). *Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia*. *Jurnal Edureligia*, Vol. 01 No. 01.
- Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Hamalik, Oemar. (2005). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali dan Mukti Ali. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Husin. (2018). *Perkembangan dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia; Tinjauan Historis, Sosiologis, Politis, Ekonomi, dan Manajemen Negara*. ADDIBA Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 2.
- Idi, Abdullah. (2007). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ar-Russ Media.

- Insani, Farah Dina. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan hingga Saat Ini. *Jurnal As-Salam*, Vol. VIII No. 1.
- Irsad, Muhammad. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah. *Jurnal Iqra* Vol. 2, no. 1.
- Langgulong, Hasan. (1992). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Lismina. (2019). *Pengembnagan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Ponorogo: Tim Uwais Inspirasi Indonesia.
- Machali, Imam. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1111, no. 1.
- _____, Imam & Ara Hidayat. (2016). *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mawardi, Amirah. *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Jurnal Tarbawi, Vol. 1 No. 1.
- Muhaimin. (2004). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulyasa. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. Warson. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 1.
- Nahrawi, Amirudin. (2008). *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Gama Media.
- Nasution, S. (2006). *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- _____. (1991). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. Ke-4.
- Pradika, Ayu Ratih Rizki. (2020). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 07 No. 01.
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn; Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar. *Jurnal PKn Progresif*, Vol. 15 No. 1.
- Rahayu, Restu dkk. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, Vol. 6 No. 4.
- Rifa'I, Ahmad dkk. (2022). Penerapan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI di Sekolah. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3 No. 8.
- Sabda, Syaifuddin. (2016). *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Salamah. (2016). *Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Suparlan. (2011). *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum & Materi Pembelajaran*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Wahyuni, Fitri. (2015). Kurikulum dari Masa Ke Masa. *Jurnal Al-Adabiya*, Vol. 10 No. 2.